

Kiprah Gereja Keuskupan Ruteng Pascatambang

(Studi Kasus Masyarakat Lingkar Tambang di Paroki St. Thomas Morus Robek, Keuskupan Ruteng)

Keristian Dahurandi

Email: tiandahurandi@stipassirilus.ac.id

Benediktus Denar

Email: bennydenar@stipassirilus.ac.id

Abstract

The Catholic Church is called to maintain the integrity of the natural environment since the environment is regarded as brothers and sisters. The Catholic Church regards this call as a sacred mission. Since the mining investment in Manggarai, West Flores occurred the Church of Diocese of Ruteng has consistently rejected it. The reasons are mining investments damage the environment and destroy the culture of local communities. Breakdown of various actions of resistance, mining activities do not exist Manggarai any more, although some Mining Business Permits (IUPs) have not been revoked by the government. However, the impact of mining does not necessarily disappear from the lives of the people around the mining sites. Based on this fact, it is an urgent call of the Catholic Church in Manggarai to assist the post-mining communities as a form of defending the poor and the suffering. To achieve this goal, this study uses qualitative methods strengthened by the process of data analysis through collection, reduction, display, and verification of data from interviews, observations, and document studies. These processes are also strengthened by questionnaire data analyzed by descriptive statistics. The results of the study indicate that the Church has been present as a sacrament of salvation and is called to keep on accompanying and healing the wounds of the residents of the former mining circle. These undertakings are carried out through

the Church's five tasks: liturgy, proclamation, service, fellowship, and witnessing with various derivative activities. But the empowerment of the church is not enough. The church must consistently develop alternative economic models so that the people/community are economically empowered without damaging the environment, adhering to the principles of sustainable development, namely the principle of democracy, the principle of justice and the principle of sustainability. Thus, the empowerment carried out truly respects participation of local communities, restores their culture, and at the same time does not destroy the integrity of creation.

Keywords: Kiprah Gereja, pertambangan, ekopastoral, keutuhan ciptaan, Keuskupan Ruteng

Pendahuluan

Paus Paulus VI, dalam ADHORTASI APOSTOLIK “OCTOGESIMA ADVENIENS” artikel 21 menegaskan bahwa manusia dan lingkungannya semakin tak terpisahkan. Lingkungan merupakan syarat mutlak kehidupan dan perkembangan manusia, sedangkan ia sendiri pada gilirannya menyempurnakan dan memuliakan lingkungannya dengan kehadirannya, kerjanya, dan pemikirannya. Akan tetapi, kemampuan kreatif manusia akan menghasilkan buah sejati dan lestari hanya sejauh manusia menghormati hukum yang mengatur kekuatan vital dan kemampuan regenerasi alam: keduanya saling bergantung dan mempunyai masa depan bersama.¹

Oleh karena itu, Paus Fransiskus melalui Ensiklik *Laudato Si*, art. 2 menegaskan bahwa kemampuan kreatif manusia mesti dibangun atas dasar konsep yang seimbang tentang alam. Alam dipandang sebagai saudara dalam dalam kesatuan ciptaan Tuhan.² Kehancuran alam ciptaan juga menjadi ancaman nyata bagi eksistensi manusia. Justru karena itulah,

1 Paus Paulus VI dalam terjemahan KWI, *Lingkungan Hidup*, art. 2-3 (Jakarta: Obor, 2014), hlm. 21-22. Penegasan ini disampaikan pula oleh Paus Paulus VI pada kesempatan pembukaan konferensi PBB di Stockholm tentang lingkungan hidup pada tahun 1971 di hadapan sekretaris jenderal PBB.

2 Paus Fransiskus dalam terjemahan KWI, *Laudato Si art. 5* (Jakarta: Obor, 2016), hlm. 7.

masalah terkait keutuhan ciptaan juga menjadi sasaran perhatian dan misi Gereja. Gereja merasa wajib menjaga keutuhan alam ciptaan yang telah diciptakan “baik adanya” (bdk. Kej 1) oleh Tuhan sendiri. Menjaga kelestarian dan keutuhan ciptaan merupakan bagian dari tugas utama Gereja karena hal itu juga merupakan bagian dari cita-cita dan kehendak Ilahi.

Salah satu penyebab kehancuran alam ciptaan adalah investasi pertambangan. Pertambangan merupakan suatu proses pengambilan endapan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan pertambangan antara lain minyak dan gas bumi (migas), biji mangan, biji emas, perak, batu bara, pasir besi, biji timah, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, dan granit. Tahapan pertambangan adalah prospeksi atau penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi atau operasi produksi, reklamasi, dan pemulihan pasca-tambang.³

Sekurang-kurangnya, ada tiga dampak positif pertambangan, yaitu: *pertama*, Dari Sisi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Industri pertambangan apabila dikelola dengan baik dan transparan tentu saja dapat memajukan pertumbuhan perekonomian suatu daerah atau negara karena dapat menarik investasi baik lokal maupun luar negeri yang tentu saja dapat meningkatkan penerimaan daerah atau negara dari sektor pajak dan secara sistemik meningkatkan ekonomi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sebab industri pertambangan tentu saja dapat menciptakan lapangan kerja. Namun, hal ini sangat bergantung pada kesiapan masyarakat sendiri sehingga bisa dipekerjakan di industri pertambangan dimaksud. Apabila tidak, masyarakat hanya akan menjadi pekerja kasar dari industri itu, sedangkan tenaga utamanya didatangkan dari daerah lain atau bahkan dari luar negeri.

Kedua, Menyiapkan Kebutuhan Energi. Hingga saat ini, dunia masih mengandalkan industri pertambangan sebagai pemasok utama

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (Minerba), pasal 1.

energi. Oleh karena itu, industri pertambangan sebagai sumber utama energi pasti secara langsung akan berdampak pada peningkatan dan pemenuhan permintaan pasokan energi di suatu negara. Sebagai contoh, penambangan bahan galian batubara yang umumnya digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tentunya akan mampu meningkatkan pasokan energi listrik di suatu daerah dikarenakan ketersediaan bahan bakar yang besar bagi pembangkit listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) khususnya. Bahkan, adanya kegiatan penambangan batubara yang cukup besar akan merangsang investasi pendirian PLTU pada daerah di sekitar penambangan batubara sehingga kebutuhan energi daerah tersebut dapat dipenuhi.

Ketiga, Pertambangan dapat Memacu Pembangunan. Orientasi dari kegiatan pertambangan tentu saja untuk memacu pembangunan ekonomi dari suatu daerah atau negara. Selalu diandaikan bahwa pembangunan di daerah tempat berlangsungnya kegiatan penambangan akan berkembang pesat sejalan dengan kegiatan penambangan itu sendiri. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan penambangan misalnya, tentu akan memicu peningkatan pembangunan di daerah tersebut. Dampak lanjutannya adalah penambangan itu sendiri akan merangsang pembangunan perusahaan-perusahaan pengguna dari bahan tambang tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut akan berimbang secara berkelanjutan terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur sosial seperti tempat ibadah, ekonomi berupa perbankan dan pasar, serta sarana pendidikan.

Sekalipun demikian, investasi pertambangan tidak luput dari dampak negatifnya. Sekurang-kurangnya, ada empat dampak negatif dari investasi pertambangan. *Pertama, Terhadap Lingkungan Hidup.* Kegiatan penambangan di mana pun rentan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi dan juga zat-zat beracun dari industri pertambangan menyebabkan munculnya

berbagai penyakit dan mengganggu kesehatan manusi.⁴ Reklamasi lahan bekas tambang tidak akan mampu mengembalikan keadaan semula. Setidaknya akan tetap tersisa wilayah dengan lubang bekas tambang.⁵

Kedua, Terhadap Ekonomi Masyarakat. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya industri pertambangan tentu saja akan amat berpengaruh terhadap rusaknya lahan pekerjaan baik pertanian, peternakan maupun perikanan. Selain itu, pertambangan menyebabkan kekayaan alam dan lingkungan dapat dimonopoli dan dirusakkan oleh keserakahan segelintir orang yang terus mengejar keuntungan pribadi.⁶ Di pihak lain, terdapat kecenderungan terjadinya pola hidup konsumtif-materialistik pada masyarakat di sekitar daerah industri pertambangan. Pola pemiskinan model inilah yang menyebabkan sulitnya melakukan advokasi tolak tambang di daerah pertambangan seperti yang dilakukan oleh JPIC (*Justice, Peace, Integration Creation*) Gereja.

Ketiga, Terhadap Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat Lokal. Industri pertambangan juga amat berdampak buruk terhadap kebudayaan masyarakat lokal. Salah satu akibat besar yang ditimbulkan adalah lenyapnya daya ingat sosial (*social memory*). Generasi baru yang lahir setelah tambang beroperasi akan mewarisi tata nilai dan sosial baru yang merupakan dampak operasi tambang dan bukan tata nilai yang semula dimiliki masyarakat setempat. Di sisi lain, mekanisme resolusi konflik tradisional yang telah hidup lama dalam masyarakat tidak lagi dijadikan kontrol dalam kehidupan sosial. Masyarakat tercabut dari realitas sosial dan kulturalnya sendiri yang membuat mereka seolah menjadi orang asing di tanah leluhur mereka.⁷

Keempat, Terhadap Institusi Politik. Investasi pertambangan apalagi yang melibatkan perusahaan-perusahaan transnasional juga

⁴ Parameter Pencemaran Udara dan Dampaknya Terhadap Kesehatan, www.depkes.go.id, diakses 5 Februari 2019

⁵ JATAM, *Catatan Akhir Tahun 2012*, Sektor Pertambangan Indonesia Kejahanatan terhadap Keselamatan Rakyat, 28 Desember 2012.

⁶ Bob Goudzwaard dan Harry de Lange, *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 25.

⁷ Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI, *Animasi Keadilan dan Perdamaian*: 2008), hlm. 35.

memungkinkan rontoknya kelembagaan politik. Kelembagaan politik digantikan oleh tata kelembagaan yang patuh kepada kepentingan korporasi. Hal ini, misalnya, terlihat dari perusahaan tambang yang bisa seenaknya meminta bantuan pemerintah untuk menggunakan alat negara (polisi, tentara, dan lain-lain) guna mengintimidasi masyarakat. Pemerintah sebenarnya sedang menjual ‘murah’ rakyatnya sendiri, atau menjual daerah, bangsa, dan negaranya.⁸

Berhadapan dengan realitas pertambangan tersebut, Gereja Keuskupan Ruteng telah banyak melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas tambang di wilayah Manggarai Raya (Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur) yang terletak di Flores Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gereja Katolik Keuskupan Ruteng konsisten menolaknya. Penolakan itu bahkan sampai melibatkan para pastor dan biarawan-biarawati dalam berbagai aksi demonstrasi bertajuk; “tolak tambang!”⁹ Di sini, Gereja Keuskupan Ruteng yang merupakan salah satu bagian dari *civil society* sangat berperan dalam menolak berbagai investasi pertambangan, yang selain merusak lingkungan, juga menyebabkan destruksi budaya masyarakat lokal dan tatanan politik.

Sekurang-kurangnya ada enam hal yang pernah dilakukan oleh Gereja Keuskupan Ruteng dalam menolak investasi pertambangan di Manggarai.¹⁰ *Pertama*, mengidentifikasi tempat-tempat yang memiliki potensi pertambangan. *Kedua*, sejak tahun 2007 mendampingi masyarakat Manggarai Barat untuk menolak kehadiran pertambangan. *Ketiga*, sejak tahun 2009 mengidentifikasi *stakeholder* dan tokoh masyarakat yang menjadi relawan dalam pendampingan masyarakat di lingkar tambang. *Keempat*, melakukan seminar-seminar dan workshop dengan tema seputar lingkungan hidup, dampak pertambangan terhadap

8 Benny Denar, “Marsel Agot dan Perjuangan Keutuhan Ciptaan”, Opini dalam *Flores Pos*, 22 Januari 2014.

9 Kamilus Pantus, “Gereja Keuskupan Ruteng Gelar Aksi Damai Tolak Tambang” dalam <https://www.mirifica.net/2014/10/15/gereja-keuskupan-ruteng-gelar-aksi-damai-tolak-tambang/>

10 Beny Denar, *Mengapa Gereja Harus Tolak Tambang?* (Maumere: Ledalero, 2015), hlm. 244-245.

keutuhan ciptaan, pandangan Kristen tentang keutuhan ciptaan, hukum pertambangan dan hak-hak masyarakat, strategi advokasi kebijakan, termasuk berkaitan dengan peran relawan dalam perjuangan advokasi kebijakan dan tolak tambang. *Kelima*, berperan sebagai mediator antara perusahaan tambang dengan masyarakat dan juga masyarakat dengan pemerintah. *Keenam*, memberikan tekanan dengan jalan melakukan aksi demonstrasi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang melegalisasi pertambangan.

Ada beberapa alasan yang patut disebutkan di sini.¹¹ *Pertama*, nilai keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan bersifat hakiki dalam hidup Kristen.¹² *Kedua*, poin ketiga misi Keuskupan Ruteng yang berbunyi: meningkatkan peran profetis Gereja dalam membangun politik yang bermoral serta menegakkan keadilan.¹³ *Ketiga*, secara riil kegiatan pertambangan yang merusak kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Terutama yang dimaksudkan adalah pertambangan mineral dan gas yang merusak kehidupan manusia dalam segala aspeknya (fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan kultural) dan keseimbangan ekosistem flora, fauna dan lingkungannya (darat, laut, dan udara). *Keempat*, kegiatan pertambangan tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian pula sumbangsih pertambangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah kecil, lebih-lebih bila dibandingkan dengan dampak kerusakannya yang dasyat dalam pencemaran air, laut, tanah, dan udara. *Kelima*, pertambangan juga membahayakan kesehatan masyarakat. Ada begitu banyak orang yang menderita ISPA di wilayah pertambangan dan ada begitu banyak lahan pertanian yang rusak/musnah karena limbah eksplorasi pertambangan. *Keenam*, kegiatan pertambangan di satu wilayah memecah belah anggota masyarakat dalam kelompok yang pro dan kontra tambang. Konflik sosial sudah sering terjadi karena perbedaan pilihan berkaitan dengan

11 Benny Denar, *Mengapa Gereja Harus Tolak Tambang?* Op. Cit., hlm. 245-246.

12 Bdk. *Dokumen Konsili Vatikan II*, GS 26.

13 Bdk. Surat Pernyataan Sikap terhadap Kebijakan Industri Pertambangan di Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, dikeluarkan pada 2 Mei 2009 di Ruteng dan ditandatangani oleh Romo Laurensius Sopang, Pr sebagai Administrator Keuskupan Ruteng.

pertambangan. *Ketujuh*, Gereja menolak investasi pertambangan terutama karena wilayah Pulau Flores tidak cocok sebagai daerah untuk industri pertambangan, sebab Flores merupakan pulau yang amat kecil dan merupakan kawasan cincin api (gunung berapi). Jika industri pertambangan dipaksakan, maka akan membahayakan masa depan Pulau Flores.

Selain itu, sikap Keuskupan Ruteng terhadap pertambangan tampak dalam pandangannya tentang lingkungan hidup. Hal ini termuat dalam beberapa rekomendasi, terutama dari Sinode III Keuskupan Ruteng, yakni 1) Gereja yang dipanggil untuk menjadi mitra Allah dalam menjaga dan memelihara keutuhan ciptaan sebagai sumber penghidupan; 2) Gereja yang membangun spiritualitas ekologis (semangat cinta lingkungan hidup) dalam diri umat kristiani melalui liturgi dan inkulturasikan ekologis; 3) Gereja yang senantiasa menggerakkan umat Kristiani untuk memulihkan dan melestarikan keutuhan ciptaan serta berkomitmen bahwa ekologi menjadi panggilan dan perutusan; 4) Gereja yang senantiasa prihatin dan responsif terhadap masalah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta dampak-dampaknya (pembabatan hutan, eksplorasi tambang, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, sampah, dan perubahan iklim); 5) Gereja yang senantiasa bertindak melawan segala bentuk perusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta dampak-dampaknya; 6) Gereja yang memiliki komitmen untuk memastikan bahwa tidak seorang pun boleh melakukan perusakan lingkungan hidup; 7) Gereja yang aktif membangun jejaring dengan pihak-pihak yang memiliki keprihatinan dan kedulian terhadap lingkungan hidup.¹⁴

Berkat berbagai aksi penolakan, aktivitas pertambangan kini hampir sudah tidak ada lagi di wilayah Manggarai Raya. Para investor tambang telah meninggalkan Manggarai dengan meninggalkan beragam persoalan. Salah satu pertanyaan yang muncul kemudian: sejauh mana kiprah Gereja Keuskupan Ruteng dalam pemberdayaan masyarakat lingkar tambang pasca aktivitas tambang? Konsep dasar pembangunan berkelanjutan

14 Bdk. Keputusan Sinode III Keuskupan Ruteng Sesi I Tentang Pastoral Ekologi, dikeluarkan di Ruteng, 17 Januari 2014, dan ditandatangani oleh Mgr. Hubertus Leteng, Pr selaku Uskup Diocesis Ruteng

adalah bahwa usaha untuk “*memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan*”.¹⁵ Dengan demikian, cita-cita dan agenda dasar pembangunan berkelanjutan diarahkan agar terjadi sinkronisasi, pengintegrasian dan memberi perhatian serta bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan hidup.¹⁶ Integrasi pembangunan sosial budaya dan pembangunan lingkungan hidup ke dalam arus utama pembangunan nasional agar kedua aspek tersebut mendapat perhatian yang sama bobotnya dengan aspek ekonomi.¹⁷ Tujuannya agar pembangunan aspek sosial budaya dan lingkungan hidup tidak dikorbankan demi dan atas nama pembangunan ekonomi. Model pembangunan seperti inilah yang seharusnya dilakukan dan ditawarkan oleh Gereja termasuk oleh Keuskupan Ruteng untuk melawan dominasi ideologi pertumbuhan yang mengorbankan kaum miskin dan menghancurkan lingkungan. Sebab seturut keyakinan imannya akan Tuhan, orang Kristen baik selaku individu maupun dalam wujud persekutuan (Gereja) mengakui bahwa alam raya dan seluruh isinya adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sekalipun demikian, ada beberapa pertanyaan penting untuk dikaji dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana kehidupan masyarakat pasca-tambang di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Paroki St. Thomas Morus Robek, Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur? *kedua*, bagaimana kiprah Gereja Katolik Keuskupan Ruteng dalam mendampingi masyarakat (korban) pasca-tambang di Paroki St. Thomas Morus Robek, Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur? *Ketiga*, bagaimana model pembangunan alternatif yang ditawarkan oleh Gereja Keuskupan Ruteng terutama terhadap masyarakat (korban) pasca-tambang di Paroki

15 (<http://www.bandungmagazine.com/> analysis/ pembangunan- berkelanjutan -gagasan -implementasi- dan -kecenderungan -realitas -di-indonesia, diakses pada 6 Februari 2019).

16 Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 190-192.

17 *Ibid*

St. Thomas Morus Robek, Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) objek yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara (FGD), observasi, dan studi dokumen. Fokus dan lokasi penelitian adalah kiprah Gereja Katolik Keuskupan Ruteng dalam mendekolonisasi pembangunan, terutama di lokasi lingkar tambang di Paroki St. Thomas Morus Robek, Keuskupan Ruteng yang pernah menjadi tempat investasi pertambangan, dalam wilayah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian dalam penelitian adalah penelitian studi kasus. Penelitian lapangan ini adalah suatu penelitian yang membuat objek penelitian sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu kelompok yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui proses koleksi, reduksi, *display*, dan verifikasi data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen yang diperkuat pula dengan data angket yang dianalisis dengan statistik deskriptif berdasarkan rerata, standar deviasi, dan standar acuan norma.

Hasil Penelitian

Paparan Data

Deskripsi Umum Angket tentang Kiprah Gereja dalam Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang di Paroki Robek, Keuskupan Ruteng

Jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap kiprah Gereja Katolik dalam mendampingi (memberdayakan) masyarakat lingkar tambang di Paroki Robek, Keuskupan Ruteng ini sebanyak 291

¹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 14.

¹⁹ Suharsimin Arikunto. *Prosedur Penelitian* (edisi revisi III) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 45.

orang yang ditentukan secara random sampling terhadap 1117 kepala keluarga yang ada di paroki ini. Elemen yang diukur meliputi variabel kiprah atau peran Gereja perihal masyarakat pasca tambang. Jumlah total butir instrumen pengukuran adalah 18 dengan skala likert (1-4). Hasil angket menunjukkan bahwa dari skor maksimal adalah 20.952, perolehan total skor penilaian berjumlah 16.419. Capaian skor ini dibandingkan dengan skor maksimal dan diubah menjadi angka relatif (%) sehingga diperoleh angka 78,36%. Dari data ini, pengolahan data menunjukkan bahwa Standar Deviasi (SD) sebesar 5,44. Dengan demikian, kriteria secara umum dapat dinyatakan pada tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Umum

Rentang Nilai	Predikat
83,81-100	Sangat Baik
78,36-83,80	Baik
72,92-78,35	Cukup Baik
0-72,91	Buruk

Berdasarkan kriteria umum di atas, variabel kiprah/peran Gereja perihal tambang memperoleh persentase sebesar 78,57 dan berkategori baik. Dengan demikian, secara umum peran Gereja dalam hal tambang di Paroki Robek dinilai baik oleh masyarakat yang mendapat pelayanan Gereja Katolik di daerah lingkar tambang di Paroki Robek. Selain itu, berdasarkan hasil angket diperoleh persentase variabel kondisi pemberdayaan masyarakat lingkar tambang di Paroki Robek sebesar 78,10%. Persentase ini apabila dibandingkan dengan kriteria umum penilaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tambang terutama pada tahun 2019 tergolong cukup baik. Itu berarti masih ada masalah dengan pemberdayaan atau dapat dikatakan belum baik kondisi pemberdayaannya. Hal ini dapat dinyatakan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kiprah Gereja dalam Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang di Paroki Robek, Keuskupan Ruteng

Variabel	Skor Variabel	Persentase	Penilaian	Total Skor yang Diperoleh
Kiprah Gereja	9146	78,57%	Baik	10.265
Pemberdayaan Masyarakat	7273	78,10%	Kurang Baik	
Total Skor				

Kiprah Gereja dinilai baik terbentuk dari penilaian positif dari masyarakat dalam bentuk jawaban masyarakat Paroki Robek, Keuskupan Ruteng terhadap beberapa butir angket berikut: nomor 1 tentang kegiatan memberikan katekese/khotbah atau bentuk pemberian informasi lainnya tentang pandangan Gereja terhadap tambang dan dampaknya terhadap keutuhan alam ciptaan dengan perolehan skor sebesar 36,87 dan berkategori sangat baik. Selain itu, kekuatan peran Gereja yang lain terdapat pada butir soal nomor 4 tentang peran untuk memperkuat hubungan antara kelompok tersebut sehingga menjadi kekuatan bersama Gereja Keuskupan Ruteng untuk mendahulukan keutuhan alam ciptaan dengan perolehan skor sebesar 32,78 dengan kategori baik. Kekuatan lain tampak pada butir soal nomor 8 tentang peran untuk melaksanakan kegiatan liturgi seperti perayaan ekaristi, sharing Kitab Suci, Ibadat Sabda, pemberkatan (sakramentali) di tempat atau terhadap alam lingkungan lingkar tambang dengan perolehan skor sebesar 32,27 dan berkategori baik. Demikian juga butir nomor 10 tentang memberikan contoh perkebunan atau pertanian sebagai tawaran alternatif lain dalam mengelola alam lingkar tambang memperoleh skor sebesar 31,75 dengan kategori baik.

Sekalipun demikian, pemberdayaan masyarakat Paroki Robek, Keuskupan Ruteng masih belum maksimal. Kesimpulan ini diketahui dari titik-titik lemah kondisi masyarakat terhadap beberapa butir angket berikut, yaitu nomor 13 tentang kemampuan membeli komoditas ‘besar’, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau

tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga dengan perolehan skor sebesar 21,22 dan berkategori cukup baik. Selain itu, kelemahan juga tampak pada butir nomor 15 tentang kebebasan relatif dari dominasi keluarga, yaitu dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah dengan perolehan skor sebesar 23,45 dan berkategori cukup baik. Kelemahan lain ditunjukkan oleh butir angket nomor 18 tentang jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan secara sendiri atau terpisah dari pasangannya dengan perolehan skor sebesar 24,69 dan berkategori cukup baik.

Penyajian Data *Focus Group Discussion* (FGD)

Kehidupan Masyarakat Pasca-Tambang

Secara umum, keadaan warga Robek pasca-tambang dapat terlihat dari beberapa aspek berikut.

Pertama, dari sisi lingkungan. Para peserta FGD mengakui bahwa kondisi lingkungan menjadi rusak akibat aktivitas pertambangan yang pernah terjadi di tempat mereka. Hal itu menyebabkan curah hujan menurun dan debit air bersih menjadi berkurang. Menurut pengakuan masyarakat, pasca aktivitas pertambangan, investor pergi begitu saja tanpa adanya upaya pemulihan terutama pada kawasan tambang.

Kedua, kondisi ekonomi. Masyarakat Robek sebagian besar bekerja sebagai petani. Sebagai petani, mereka lebih banyak hidup dari kemurahan alam. Oleh karena itu, kerusakan alam amat berpengaruh terhadap penghasilan mereka di sektor pertanian.

Ketiga, peserta FGD mengakui bahwa pada saat pertambangan beroperasi, muncul konflik sosial di tengah masyarakat. Konflik terjadi terutama antara kelompok warga pro terhadap aktivitas pertambangan dengan kelompok warga yang kontra terhadap aktivitas pertambangan. Konflik ini dapat melunturkan kohesi sosial institusi adat *Lumpung*. Sampai sekarang, konflik itu masih terasa, warga mengakui bahwa

konflik tersebut tidak sehangat dulu waktu aktivitas pertambangan masih berlangsung. Hubungan sosial antar-warga pelan-pelan mulai mencair.

Kelima, kondisi gerejawi (agama). Selain oleh LSM-LSM tertentu, tetapi gerakan penolakan aktivitas pertambangan di wilayah Robek, Kabupaten Manggarai lebih besar dimotori oleh pihak Gereja Katolik, antara lain Komisi JPIC Keuskupan Ruteng, JPIC OFM, dan JPIC SVD. Oleh karena itu, warga masyarakat yang kontra terhadap aktivitas pertambangan menjadi dekat dengan petugas Gereja, sebaliknya, warga masyarakat yang pro aktivitas pertambangan menjadi tidak suka dengan pilihan sikap Gereja. Walaupun demikian, mereka tetap mengambil bagian dalam hidup menggereja lainnya, seperti mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu.

Kiprah Gereja Katolik dalam Mendampingi Masyarakat Pasca-Tambang

Terkait kiprah Gereja, kelompok masyarakat yang mengikuti FGD menjawab sebagai berikut. *Pertama*, setelah kegiatan pertambangan ditutup, anggota LSM termasuk JPIC milik Gereja tidak sering datang lagi. *Kedua*, seringkali para pastor menyampaikan renungan atau homili tentang pentingnya menjaga keutuhan ciptaan termasuk tolak tambang. *Ketiga*, katekese tentang pentingnya menjaga keutuhan ciptaan termasuk tolak tambang juga sering dilaksanakan oleh Gereja. *Keempat*, Gereja tidak pernah melakukan reboisasi, kecuali Orang Muda Katolik (OMK) pernah melakukan aksi reboisasi di sekitar pusat pertambangan. *Kelima*, Gereja tidak mengambil bagian dalam tindakan pemulihan, pasca-tambang, terlebih khusus bagi pertanian. *Keenam*, JPIC SVD pernah membuka koperasi demi memberdayakan umat di sekitar pertambangan. *Ketujuh*, JPIC OFM bekerja sama dengan LSM melakukan berbagai pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk pelatihan pembuatan minyak kelapa murni yang disebut *Virgin Coconut Oil* (VCO).

Model Pembangunan Alternatif yang Ditawarkan Gereja Keuskupan Ruteng Terhadap Masyarakat Pasca-Tambang

Menurut warga yang menjadi peserta FGD, selama ini Gereja melalui Komisi JPIC SVD telah membuka koperasi (Koperasi Soverdian)

demi pemberdayaan ekonomi umat di sekitar wilayah lingkar tambang. Namun koperasi ini belum menjangkau semua warga di lingkar tambang. Selain itu, Gereja melalui JPIC OFM bekerja sama dengan berbagai LSM melakukan berbagai pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk pelatihan pembuatan minyak kelapa murni yang disebut *Virgin Coconut Oil (VCO)*. Gereja juga melalui Komisi Pastoral Sosial Ekonomi (PSE) pernah memberdayakan para petani di sekitar wilayah lingkar tambang dengan memberikan bibit jagung dan pembuatan kebun contoh yang menggunakan sistem pertanian organik. Walaupun demikian, peserta FGD mengakui bahwa usaha tersebut belum massif dilakukan.

Pembahasan Data

Kehidupan Masyarakat Pasca-Tambang

Kehidupan masyarakat pasca-tambang ditandai dan dapat dijelaskan oleh empat hal berikut. *Pertama*, Penurunan Kualitas Lingkungan. Studi empiris menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di manapun rentan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.²⁰ Dalam waktu yang relatif singkat, kegiatan penambangan dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (*land impact*), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya. Pertambangan juga dapat menyebabkan perubahan bentang alam dan krisis air. Aktivitas pertambangan yang pernah terjadi meninggalkan luka lingkungan. Deforestasi atau penurunan fungsi hutan yang ditandai oleh penebangan hingga penggalian dan pembuangan limbah hasil tambang telah mengubah lahan dan merusak ekosistem setempat. Bahkan jika ada reklamasi sekalipun, lahan bekas tambang tidak akan mampu kembali ke keadaan semula. Setidaknya akan tetap tersisa wilayah dengan lobang bekas tambang.²¹

Kedua, Sumber-sumber Ekonomi Warga Terkuras. Pertambangan juga rentan menyebabkan terkurasnya sumber-sumber ekonomi

20 Benny Denar, 2015, *Op. Cit.*,

21 Bdk. JATAM, *Catatan Akhir Tahun 2012, Sektor Pertambangan Indonesia Kejahanatan terhadap Keselamatan Rakyat*

masyarakat lokal. Masyarakat mengakui bahwa setelah beroperasinya pertambangan lahan-lahan pertanian milik warga menjadi kering dan kesulitan mendapatkan air, karena curah hujan berkurang. Kondisi ini menyebabkan penghasilan warga dari sektor pertanian kian menurun. Aktivitas pertambangan telah meninggalkan luka bagi mereka, terutama karena sumber-sumber ekonomi utama mereka kian terkuras dan tak lagi memberi hasil seperti sedia kala. Pertambangan menyebabkan kekayaan alam dan lingkungan yang seharusnya diperuntukkan bagi semua orang, tetapi telah dimonopoli dan dirusak oleh keserakahan segelintir orang yang terus mengejar keuntungan pribadi.²²

Ketiga, Ikatan Sosial dan Budaya yang Terkoyak. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa investasi pertambangan rentan meruntuhkan kohesi sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Rontoknya tatanan sosial dan ikatan kekeluargaan antarwarga menyebabkan perpecahan, persengketaan dan bahkan sampai ke taraf konflik yang mengarah kepada usaha melenyapkan eksistensi mereka sendiri satu sama lain. Di sisi lain, mekanisme resolusi konflik tradisional yang telah hidup lama dalam masyarakat tidak lagi dijadikan kontrol dalam kehidupan sosial. “Perasaan terusir dari lingkungannya sendiri, ketidakmampuan untuk ikut menikmati hasil bumi yang dipijaknya, dampak ekonomi dan sosial yang tidak selalu positif, semuanya menjadi dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat.”²³

Kiprah Gereja Katolik dalam Mendampingi Masyarakat Pasca-Tambang

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Gereja Katolik berperan besar sebagai motor gerakan yang menolak aktivitas pertambangan di Robek, Kabupaten Manggarai. Bersama berbagai LSM pecinta lingkungan dan warga masyarakat, para anggota LSM termasuk Komisi JPIC milik Gereja ikut berpartisipasi membantu dalam perlawan dan menolak aktivitas pertambangan. Jalan itu diambil karena Gereja menyadari dirinya

22 Bdk. Goudzwaard dan Harry de Lange, 1998, *Op. Cit.*

23 Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI, *Op. Cit.*

sebagai mitra Allah yang bertugas untuk turut merawat dan melestarikan keutuhan ciptaan sebagai sumber penghidupan.

Peran Gereja tersebut sesuai dengan *panca (lima) tugas* dalam dunia. *Pertama*, liturgi atau pengudusan. Tugas Gereja dalam bidang liturgi ini diwujudkan dalam bentuk upacara liturgi dan paraliturgi. Gereja Keuskupan Ruteng memberikan penguatan di bidang pengudusan ini kepada masyarakat lingkar tambang dengan cara merayakan liturgi seperti perayaan ekaristi, sharing Kitab Suci, Ibadat Sabda, pemberkatan (sakramentali) di tempat atau terhadap alam lingkungan lingkar tambang.

Kedua, *kerygma* atau pewartaan. Dalam *kerygma*, Gereja dipanggil untuk mewartakan dan mengajar umat Allah berdasarkan kitab suci dan tradisi Gereja. Gereja diberi kepercayaan, dipanggil, dan diutus Tuhan Yesus untuk mengambil bagian dalam tugas pewartaan Kabar Gembira (Bdk. LG art 35). Tuhan Yesus mengutus Gereja dengan bersabda: “*Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu*” (Mat 28: 19-20). Tugas mewartakan (*kerygma*) ini dilakukan Gereja Keuskupan Ruteng terhadap masyarakat lingkar tambang, yaitu dengan memberikan katekese dan khutbah atau bentuk pemberian informasi lainnya tentang pandangan Gereja terhadap tambang dan dampaknya terhadap keutuhan alam ciptaan.

Ketiga, *koinonia* atau persekutuan, yaitu suatu bentuk pelayanan Gereja dengan memperhatikan segi kebersamaan dalam jemaat. Sesuai dengan hasil analisis angket dan FGD ditemukan bahwa tugas membentuk persekutuan (*kerygma*) dilakukan Gereja Keuskupan Ruteng terhadap masyarakat lingkar tambang dengan cara memfasilitasi terbentuknya komunitas atau kelompok sebagai tempat untuk mendapatkan pencerahan atau advokasi dalam kaitan dengan keuntungan dan kerugian tambang. Gereja juga berusaha memperkuat hubungan antara kelompok tersebut sehingga menjadi kekuatan bersama Gereja Keuskupan Ruteng untuk mendahulukan keutuhan alam ciptaan.

Keempat, diakonia atau pelayanan. Itu berarti Gereja ikut serta dalam melaksanakan karya karitatif/cinta kasih melalui aneka kegiatan amal kasih Kristiani, khususnya kepada mereka yang miskin, telantar, dan tersingkir. Tugas ini sesuai jati diri dasariah Gereja seperti yang termaktub dalam Konsili Vatikan II yang pertama-tama menggambarkan Gereja bukan sebagai suatu institusi dunia, melainkan sebagai suatu persekutuan ataupun paguyuban umat beriman yang menerima dan meneruskan cahaya Kristus yang diwujudkan dalam warna dasar perbuatan atau amal yang baik dan berguna bagi sesama. Di sini dibutuhkan adanya kerja sama dalam kasih, keterbukaan yang penuh empati, partisipasi dan keiklasan hati untuk berbagi satu sama lain demi kepentingan seluruh jemaat (bdk. Kis 4:32-35)

Kelima, martyria atau kesaksian. Yang dimaksudkan dengan *martyria* adalah ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Tugas ini dihayati oleh Gereja Keuskupan Ruteng dengan beberapa hal. *Pertama*, memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan studi banding terhadap alam lingkungan tambang di tempat lain sebagai tempat pembanding. *Kedua*, memberikan kesaksian-kesaksian tentang alam dan dampak tambang bagi alam lingkungan (manusia dan makhluk hidup lainnya). *Ketiga*, memberikan contoh perkebunan atau pertanian sebagai tawaran alternatif lain dalam mengelola alam lingkar tambang.

Model Pembangunan Alternatif yang Ditawarkan Gereja Keuskupan Ruteng Terhadap Masyarakat Pasca-Tambang

Gereja pada dasarnya menolak berbagai bentuk pembangunan yang merusakkan kemanusiaan dan mendegradasi lingkungan dan mendorong model-model pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan dan lebih menghargai masyarakat dan budaya lokal. Pembangunan berkelanjutan penting karena dia memiliki cita-cita dan agenda dasar yang diarahkan agar terjadi sinkronisasi, pengintegrasian dan memberi perhatian serta bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup.²⁴

24 Sony Keraf, 2010. *Op. Cit.*

Ada beberapa tawaran pengembangan ekonomi alternatif yang sudah dilakukan selama ini. *Pertama*, Gereja melalui Komisi JPIC SVD telah membuka koperasi demi pemberdayaan ekonomi umat di sekitar wilayah lingkar tambang. Walaupun koperasi ini belum menjangkau semua warga di lingkar tambang, namun kiprahnya sudah mulai menunjukkan peran Gereja dalam pembangunan ekonomi umat atau masyarakat. *Kedua*, Gereja melalui JPIC OFM bekerja sama dengan berbagai LSM melakukan berbagai pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk pelatihan pembuatan minyak kelapa murni yang disebut *Virgin Coconut Oil* (VCO). *Ketiga*, Gereja memberikan contoh perkebunan atau pertanian dengan konsep ekopastoral. Gerakan ekopastoral penting untuk melawan sistem ekonomi/pembangunan (termasuk pertanian) eksploratif yang tidak ramah terhadap lingkungan hidup.

Ada beberapa gerakan yang dibuat untuk mengembangkan ekopastoral.²⁵ *Pertama*, menggali dan menemukan kembali praktik-praktik pertanian yang didasarkan pada kearifan lokal yang sangat menghargai keutuhan ciptaan. Hal ini sesuai dengan keyakinan teologis bahwa alam menyediakan bagi manusia sejumlah referensi pengetahuan bukan hanya untuk kebutuhan pengembangan intelektual, melainkan juga untuk penguatan iman dan penyerahan diri kepada pemeliharaan Allah.²⁶ Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah kekayaan sosial (social asset) yang mengandung pesan-pesan moral, etika, dan spiritual yang langgeng dan lestari.

Kedua, ekopastoral dikembangkan dengan mengajak umat dan masyarakat untuk menghormati, menghargai, dan memuliakan sumber-sumber pangan (air, tanah, dan tanaman) sebagai bagian dari perwujudan hidup beriman dan beragama. Di sini, pewartaan iman harus juga menyentuh usaha penyelamatan lingkungan hidup dari keserakahan manusia.

25 Bdk. Benny Denar, "Pertobatan Ekologis dan Gerakan Ekopastoral" Opini dalam *Flores Pos*, Senin, 24 Februari 2014

26 Bdk. Ebenhaizer I Nuban Timo, *Anak Matahari Teologi Rakyat Bolelebo Tentang Pembangunan* (Maumere: Ledalero, 2010), hl.m. v-vi.

Ketiga, ekopastoral membangun dan memperkuat kelompok-kelompok tani yang bersahabat dengan alam (pertanian organik/pertanian lestari). Kelompok-kelompok tani seperti inilah yang diharapkan mampu menjadi teladan bagi model pertanian berwawasan lingkungan. Untuk mendukung petani-petani seperti ini, perlu diambil langkah-langkah advokasi menghadapi kebijakan-kebijakan publik yang tidak berpihak kepada kepentingan petani dan dunia pertanian yang berwawasan lingkungan. Dengan mengembangkan berbagai tawaran pengembangan ekonomi alternatif, warga lingkar tambang diharapkan memiliki kemandirian ekonomi yang membuat mereka tidak lagi tertarik menerima tawaran-tawaran menggiurkan dari investor tambang.

Penutup

Sinode III Keuskupan Ruteng menegaskan bahwa Gereja menyadari dirinya sebagai mitra Allah yang bertugas turut merawat dan melestarikan keutuhan ciptaan sebagai sumber penghidupan. Berangkat dari kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan ciptaan tersebut, maka Gereja Keuskupan Ruteng mengambil peran sebagai kekuatan utama yang menolak aktivitas pertambangan di Manggarai Raya-Flores, termasuk di wilayah Robek, Kabupaten Manggarai. Sikap gereja tersebut amat beralasan, sebab dalam kenyataan investasi pertambangan di wilayah tersebut telah merusakan lingkungan hidup, tergerusnya sumber-sumber ekonomi warga lokal, dan terjadinya destruksi budaya sekaligus rusaknya kohesi sosial dalam masyarakat. Sebagai sakramen keselamatan, Gereja dipanggil untuk terus mendampingi dan menyembuhkan luka-luka warga bekas lingkar tambang tersebut sebagai wujud semangat ensiklik *Evangelium Vitae* dari mendiang Paus Yohanes Paulus II yang berbicara tentang pentingnya melawan “budaya kematian” dengan “Injil kehidupan.”

Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan secara saksama. *Pertama*, Gereja Keuskupan Ruteng, baik sebagai persekutuan maupun sebagai suatu institusi perlu konsisten dengan sikapnya menolak pertambangan. *Kedua*, Gereja Keuskupan Ruteng terus mengintensifkan koinonia ekologis dan pertobatan ekologis demi terwujudnya persahabatan dan rekonsiliasi antara manusia dengan

Allah dan seluruh ciptaan. *Ketiga*, Gereja Keuskupan Ruteng perlu mengembangkan model diakonia ekologis yang transformatif untuk melayani umat manusia secara multidimensional (roh-jiwa dan tubuh) dan multi-sektoral (ekonomi, politik, kultural, pendidikan, hukum dan lingkungan). *Keempat*, khusus terkait masyarakat/umat bekas wilayah lingkar tambang di Robek, Kabupaten Manggarai, Gereja harus tetap memberikan pemberdayaan secara integral, baik penguatan secara spiritual maupun pengembangan kemandirian ekonomi tanpa merusak lingkungan.

Daftar Pustaka

Dokumen

- Paus Paulus VI. (2014). *Lingkungan Hidup*. Terj. KWI. Jakarta: Obor.
- Paus Fransiskus. (2016). *Laudato Si*. Terj. KWI. Jakarta: Obor.
- Konsili Vatikan II. (2012). *Dokumen Konsili Vatikan II*. Cetakan 11. Terj. R. Hardawiryana. Jakarta: Obor.
- Keputusan Sinode III Keuskupan Ruteng Sesi I tentang Pastoral Ekologi. Dikeluarkan di Ruteng pada 17 Januari 2014. Ditandatangani oleh Mgr. Hubertus Leteng, Pr selaku Uskup Diocesis Ruteng.
- Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian. (2009). *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Terj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledalero.
- Nota Pastoral KWI tentang “Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Alam Ciptaan”. Dikeluarkan di Jakarta pada April 2013. Ditandatangani oleh Mgr. Ignatius Suharyo, Pr selaku Ketua dan Mgr. Johannes Pujasumarta, Pr selaku Sekretaris Jenderal.
- Surat Pernyataan Sikap Terhadap Kebijakan Industri Pertambangan di Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Dikeluarkan pada 02 Mei 2009 di Ruteng. Ditandatangani oleh Romo Laurensius Sopang, Pr sebagai Administrator Keuskupan Ruteng.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (Minerba).
- Yohanes Paulus II. (1995). *Redemptor Hominis*. Terj. R. Hardawiryan. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Yohanes Paulus II. (1992) *Centesimus Annus*. Terj. R. Hardawiryan. Cetakan II. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KW,
- Yohanes Paulus II. (1988). *Sollicitudo Rei Socialis*. Terj. Petrus Turang. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian* (edisi revisi III). Jakarta: Rineka Cipta .
- Asshidiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Denar, Benny. (2015). *Mengapa Gereja Harus Tolak Tambang?*. Maumere: Ledalero
- Goudzwaard, Bob dan Harry de Lange. (1998). *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasiman, Ferdy. (2014). *Monster Tambang Gerus Ruang Hidup Warga Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: JPIC – OFM Indonesia.
- Keraf, Sonny. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI. (2008). *Animasi Keadilan dan Perdamaian*. Jakarta: KWI.
- Ndraha, Taliziduhu. (1987). *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Salamudin. (2011). *Penjajahan dari Lubang Tambang*. Malang: In-TRANS Publishing.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Timo, Ebenhaezer I Nuban. (2010). *Anak Matahari Teologi Rakyat Bolelebo Tentang Pembangunan*. Maumere: Ledalero.

Manuskrip, Jurnal dan Majalah

- Denar, Benny. “Marsel Agot dan Perjuangan Keutuhan Ciptaan”. Opini dalam *Flores Pos*, Rabu 22 Januari 2014.
- Denar, Benny. “Pertobatan Ekologis dan Gerakan Ekopastoral”. Opini dalam *Flores Pos*, Senin 24 Februari 2014.
- Denar, Benny. “Tambang Jangan Lecehkan Hak Ulayat”. Berita dalam *Flores Pos*, Rabu 01 Juli 2009.
- Dokumen JPIC OFM. Tambang Proses Pemiskinan dan Pemusnahan Peradaban Bangsa Manggarai Kompilasi Diskusi tentang Tambang di Manggarai.
- Dokumen JPIC SVD Ruteng. Laporan Evaluasi Program Penguatan Masyarakat Lingkar Tambang di Manggarai – Dioceses Ruteng. Project No. 416-004-1028, Juli 2010.
- JATAM. *Catatan Akhir Tahun 2012*. Sektor Pertambangan Indonesia Kejahatan terhadap Keselamatan Rakyat, 28 Desember 2012.

Internet

- <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/4033/1527>
- <http://www.bandungmagazine.com/analysis/pembangunan-berkelanjutan-gagasan-implementasi-dan-kecenderungan-realitas-di-indonesia>, diakses pada 6 Februari 2019).
- Kamilus Pantus, “Gereja Keuskupan Ruteng Gelar Aksi Damai Tolak Tambang” dalam <https://www.mirifica.net/2014/10/15/gereja-keuskupan-ruteng-gelar-aksi-damai-tolak-tambang/>
- Parameter Pencemaran Udara dan Dampaknya Terhadap Kesehatan*, www.depkes.go.id, diakses 5 Februari 2019.